

WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Oleh

Edy Supriyadi dan Zamtinah

Abstrak

Pada tahun 1994 nanti, pemerintah akan memberlakukan program wajib belajar 9 tahun, yaitu pendidikan dasar minimal yang harus dialami oleh setiap warga negara. Program pemerataan kesempatan belajar ini dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi anggota masyarakat yang tahu akan kewajiban dan haknya, memiliki keterampilan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program ini sangat esensial terutama bagi masyarakat tidak mampu yang sebagian besar tinggal di pedesaan karena anak-anak usia sekolah yang tidak memperoleh kesempatan menikmati pendidikan formal SD dan SLTP sebagian besar berasal dari masyarakat ini. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang kurang begitu menguntungkan, yaitu seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran tentang pendidikan, kondisi lingkungan dan lain-lainnya, maka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun hendaknya direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut sehingga program wajib belajar dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, sistem pendidikan (wajib 9 tahun) yang hendak diterapkan hendaknya sejalan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat karena pendidikan bagi masyarakat desa harus menyajikan model yang hidup, berfaedah, diperlukan dan cocok dengan situasi kebudayaan pedesaan setempat, baik lokal maupun regional.

Pendahuluan

Keberhasilan dan kelangsungan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sumber daya manusia karena manusia merupakan pelaku utama dalam setiap aktivitas pembangunan. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, akan sangat besar kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan adanya pendidikan, yaitu sebagai alat yang akan mengembangkan perilaku dan kemampuannya.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan adanya wajib belajar 9 tahun bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan belajar sehingga menjadi masyarakat yang mempunyai potensi memadai untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Wajib belajar, terutama pada pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, bukan merupakan hal baru karena mereka telah lama melaksanakannya, dan bahkan sampai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini di samping kemampuan ekonomi untuk biaya pendidikan yang telah memadai, juga tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya relatif tinggi. Sebaliknya, wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat tidak mampu yang sebagian besar tinggal di pedesaan merupakan suatu permasalahan yang sangat esensial mengingat anak-anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak memperoleh kesempatan menikmati pendidikan formal pada jenjang SLTP cukup banyak, yaitu sekitar 24% (Dachnel Kamars, 1989:49). Sebagian besar anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SLTP tersebut disebabkan oleh alasan ekonomi orang tua dan kondisi lingkungannya, yaitu di pedesaan (Saidiharjo, 1988:68). Masyarakat pedesaan masih merasa enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SD atau SLTP. Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan di luar kemampuan mereka dan taraf kesadaran terhadap pendidikan masih relatif rendah. Di samping itu, orang tua sangat membutuhkan anaknya untuk membantu meringankan bebannya, baik di sawah, menggembala ternak, usaha dagang dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan program wajib belajar pada tahun 1994 nanti, terutama untuk masyarakat tidak mampu yang sebagian besar tinggal di pedesaan, akan menemui beberapa hambatan, sehingga harus direncanakan sedemikian rupa agar program pendidikan yang sangat penting ini dapat mencapai sasarannya dan menghasilkan masyarakat yang mempunyai potensi memadai untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pentingnya Pendidikan Dasar

Pendidikan merupakan suatu investasi yang penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan

berperan dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui, sebentar lagi bangsa Indonesia akan memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua dan era tinggal landas yang tentu saja memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Untuk itu tugas dan peran pendidikan akan lebih berat lagi khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia sebagaimana yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Tinggi rendahnya kualitas masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat pendidikannya. menurut Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo (Yetty N, 1992) salah satu faktor penting dari kemajuan dan martabat suatu bangsa dan negara, khususnya negara berkembang dapat dilihat dari berhasil tidaknya pendidikan pada tingkat dasar. Logikanya, keberhasilan pendidikan dasar akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan apa yang biasa disebut "pendidikan dasar sebagai basis ekologi" bagi tumbuhnya bibit-bibit unggul. Menurut hukum evolusi alam, tidak ada hal satu pun yang timbul begitu saja dari dan dalam kehampaan. Barang sesuatu selalu membutuhkan alam ekologis yang luas, yang merupakan basis bagi tumbuhnya sesuatu yang memadai. Demikian pula kita perlu sadar bahwa untuk melahirkan para ahli, doktor dan para cerdas pandai dengan kemampuan yang tinggi, mutlak diperlukan basis yang sangat luas dan kuat, berupa tanah tumbuhnya pendidikan dasar yang baik. Tanpa basis yang luas dan kuat, kita tidak mungkin bisa memperoleh sarjana-sarjana yang berkualitas sebagaimana tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju ini.

Untuk itu pendidikan dasar mempunyai posisi yang penting sehingga sangatlah tepat dengan diadakannya program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya wajib belajar 9 tahun merupakan pendidikan dasar minimal yang harus dialami oleh setiap warga negara agar yang bersangkutan dapat menjadi anggota masyarakat yang tahu akan kewajiban dan haknya, memiliki keterampilan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kendala-kendala yang Dihadapi Anak Tidak Mampu

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, wajib belajar merupakan program pendidikan yang sangat berarti bagi masyarakat tidak mampu yang sebagian besar tinggal di pedesaan, mengingat masyarakat ini belum menikmati pendidikan dasar, khususnya SLTP. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang cenderung masih tradisional dan konservatif dalam segala aktivitas hidupnya dibanding dengan masyarakat perkotaan. Demikian pula bila dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di kota, anak-anak di pedesaan mempunyai banyak kekurangan, terutama dalam bidang pendidikan.

Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat tidak mampu di pedesaan dalam melaksanakan pendidikan dasar, antara lain sebagai berikut.

Penghasilan

Meskipun pembangunan di Indonesia telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya, namun angka kemiskinan masih cukup besar, yaitu sekitar 30 juta jiwa (Pelita, 1991). Kondisi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat tersebut merupakan kendala yang paling berat. Sebagaimana dikatakan oleh Lourie dan Reif (Suryati Sidharto, 1989:63) bahwa kemiskinan, yaitu taraf orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Kemiskinan menyebabkan orang tua kurang mempunyai motivasi untuk menyekolahkan anaknya, tetapi cenderung mengharapkan anak-anaknya bisa membantu pekerjaannya, sehingga anak dipandang sebagai tenaga kerja yang dapat membantu meringankan beban orang tua. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan bagi anak untuk menikmati pendidikan sangatlah kecil.

Menurut Backman (Woolfolk, 1984:122), murid-murid yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi menunjukkan prestasi belajar yang lebih tinggi dan dapat bersekolah lebih lama daripada murid-murid yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah. Hal ini memang wajar sebab pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk biaya sekolah (SPP), buku-buku, pakaian

seragam, sarana dan prasarana lainnya. Menurut hasil penelitian James B. Conant (Aswandi Bahar, 1989:131), siswa-siswa SD di daerah perkampungan yang miskin pada umumnya *slow readers* (kemampuan bacanya rendah) bila dibandingkan dengan siswa-siswa SD di kota. Hal ini disebabkan ketersediaan buku bacaan SD di kota lebih banyak dibanding buku bacaan di pedesaan. Para orang tua murid di pedesaan tidak mampu membeli buku bacaan lain, seperti surat kabar, majalah, komik dan lain-lainnya yang dapat merangsang anak membaca lebih giat dan banyak.

Taraf Pendidikan Orang Tua

Kesadaran masyarakat di pedesaan untuk menyekolahkan anaknya relatif rendah. Hal ini mengingat taraf pendidikan orang tua yang tidak jarang belum pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga tidak dapat memahami arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Menurut Cole S. Brembeck (Aswandi Bahar, 1989:127), tingkat pendidikan dan keterlibatan orang tua merupakan dua unsur yang esensial dalam pendidikan anak. Dorongan dan sifat acuh tak acuh orang tua baik sengaja maupun tidak sengaja akan tetap mempengaruhi aspirasi anak terhadap pendidikan. Semakin banyak anak merasakan adanya dorongan dari orang tuanya semakin besar pengaruhnya terhadap aspirasi anak tersebut terhadap pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam mendorong anaknya dalam pendidikan tergantung pada tingkat pendidikan orang tua.

Mengingat tingkat pendidikannya yang relatif rendah, tidak sedikit masyarakat pedesaan yang masih mempunyai anggapan bahwa kemampuan baca tulis saja sudah mencukupi sehingga banyak siswa sekolah dasar yang tidak menyelesaikan sekolahnya (*drop out*). Hal ini di samping disebabkan oleh kondisi ekonominya yang kurang menguntungkan (tidak mampu) juga karena rendahnya wawasan orang tua dan aspirasi anak terhadap pendidikan.

Secara nasional jumlah siswa Sekolah Dasar yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dari tahun ke tahun persentasenya cenderung makin meningkat. Tabel 1 berikut ini menunjukkan statistik jumlah siswa putus sekolah SD dan SLTP di Indonesia.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Putus Sekolah SD dan SLTP
di Indonesia Tahun 1986/1987 - 1989/1990

No.	Jenjang Sekolah	'86/87-'87/88		'87/88-'88/89		'88/89-'89/90	
		Jml/Tot.	%	Jml/Tot.	%	Jml/Tot.	%
1.	SD	993.006	3,76%	1077.212	4,04%	1219.260	4,56%
2	SLTP	228.203	3,72%	250.166	3,90%	801.407	12,43%

Sumber: Diolah dari Data Statistik Persekolahan SD dan SLTP tahun 1989/90, Pusat Informatik Balitbang Depdikbud

Kemampuan Kognitif Kecerdasan

Menurut Woolfolk (1984:138), kecerdasan atau kemampuan intelektual seseorang sangat dipengaruhi oleh keturunan (heredity) dan lingkungan (environment). Keturunan dan lingkungan merupakan dua faktor yang merupakan satu kesatuan. Apabila "gen" orang tua termasuk baik, yakni mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan hidup dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak maka kemungkinan besar kemampuan intelektual anak juga akan tinggi.

Masyarakat pedesaan, sebagaimana diutarakan di muka, mempunyai kondisi yang kurang menguntungkan, yakni kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikannya relatif rendah. Gaya hidup masyarakat ini cenderung sederhana dan lambat dalam mengikuti maupun mengantisipasi kemajuan zaman. Demikian pula dalam merawat dan mendidik anak-anaknya kurang begitu diperhatikan.

Taraf ekonomi orang tua yang miskin menyebabkan kurang terpenuhinya menu-menu makanan yang bergizi. Di samping itu, kondisi lingkungan dan kesadaran akan makanan yang bergizi masih rendah sehingga masyarakat masih mempunyai prinsip "yang penting bisa kenyang". Hal ini menyebabkan anak-anak di desa tidak bisa tumbuh secara optimal, terutama dalam kemampuan kognitifnya. Dengan kondisi seperti itu maka masyarakat pedesaan kemungkinan besar akan mempunyai keturunan dengan tingkat kemampuan intelektual yang relatif rendah. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Woolfolk (1984:138), bahwa siswa yang berasal dari

masyarakat yang kelas sosial ekonominya rendah cenderung mempunyai kecerdasan yang lebih rendah dibanding kecerdasan siswa dari masyarakat yang kelas sosial ekonominya lebih tinggi.

Lokasi Sekolah

Lokasi sekolah (SLTP) pada umumnya agak jauh dari pedesaan, dan hal ini menyebabkan kurang berminat masyarakat pedesaan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dewasa ini SLTP memang telah menyebar hampir di semua kota kecamatan, tetapi masih relatif jauh dari pedesaan apalagi di daerah-daerah terpencil.

Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Pelaksanaan wajib belajar khususnya bagi masyarakat tidak mampu hendaknya tidak semata-mata untuk perluasan kesempatan pendidikan saja, tetapi lebih menekankan juga pada kemungkinan meningkatkan taraf hidupnya. John Simons (1980:75), ahli ekonomi dari Bank Dunia dan pengamat masalah pendidikan di negara-negara berkembang menyatakan bahwa perluasan pendidikan di negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik dan kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat mampu dan masyarakat tidak mampu. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena makin meningkatnya tuntutan pekerjaan yang lebih sesuai dengan taraf berpendidikan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program wajib belajar di Indonesia memerlukan usaha-usaha komplementer untuk lebih memperluas lapangan kerja sebagai konsekuensi terhadap program perluasan kesempatan belajar tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun, terutama bagi masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut.

Para siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu hendaknya dibebaskan dari kewajiban membayar biaya-biaya sekolah atau paling tidak diberi keringanan. Di samping itu, perlu diusahakan adanya bantuan pakaian seragam dan peralatan sekolah lainnya, seperti buku-buku, alat tulis, sepatu dan sebagainya. Fasilitas ini sangat berarti bagi mereka, dan

diharapkan bisa menarik simpati dan menambah motivasi untuk sekolah. Ada dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Pertama, program Orang Tua Asuh bagi anak kurang mampu dalam rangka wajib belajar yang telah dimulai sejak tahun 1984 hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Jika perlu pemerintah menghimbau kepada para pengusaha dan pejabat-pejabat pemerintah baik mulai dari pejabat pemerintah desa sampai pemerintah pusat untuk menjadi orang tua asuh. Kedua, hendaknya pemerintah mengusahakan dana subsidi untuk anak tidak mampu, jika memungkinkan perlu diadakan semacam *Pajak Pendidikan*.

Mengingat sebagian besar anak-anak di pedesaan masih membantu pekerjaan orang tuanya, maka pelaksanaan wajib belajar hendaknya bersifat fleksibel. Waktu sekolah tidak harus di pagi hari sebagaimana umumnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerahnya, yaitu bisa di siang hari atau di sore hari. Untuk itu agar wajib belajar 9 tahun ini dapat terlaksana dengan baik, maka adanya SD PAMONG dan SMP Terbuka khususnya untuk siswa yang kurang mampu mutlak diperlukan.

SD PAMONG, yang merupakan singkatan dari Sekolah Dasar Proyek Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru, merupakan SD yang sangat sesuai untuk anak-anak tidak mampu. Salah satu prinsip SD PAMONG adalah bahwa belajar dapat berlangsung di berbagai tempat. Dengan sistem sekolah ini diusahakan bisa mengubah pandangan bahwa belajar hanya dapat terjadi di dalam gedung sekolah dan bahwa jika anak putus sekolah maka berarti juga putus belajar. Dengan demikian, sistem SD PAMONG di samping merupakan usaha untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, juga berusaha menciptakan wadah dan kesempatan bagi anak yang karena satu dan lain hal terpaksa tidak dapat belajar di sekolah biasa. Penyelenggaraan SD PAMONG dapat mewadahi anak-anak pada usia wajib belajar untuk 6 tahun pertama (SD 6 tahun), sedangkan untuk 3 tahun berikutnya perlu adanya SMP yang hampir serupa dengan SD PAMONG, yaitu SMP Terbuka.

Diadakannya SMP Terbuka dimaksudkan untuk membuka salah satu kesempatan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di tingkat SMP. Selama ini sebagian lulusan SD tidak dapat melanjutkan pel-

ajarannya ke SMP biasa, antara lain disebabkan terbatasnya SMP, letak sekolah yang tak terjangkau oleh tempat tinggal mereka yang terpencil, waktu atau jadwal sekolah yang tertentu, dan sebagainya. Melalui SMP Terbuka dapat diberikan suatu kesempatan yang terbuka untuk melanjutkan sekolah bagi sejumlah besar siswa yang selama ini belum memperolehnya, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Tentu saja, sebagaimana SD PAMONG, biaya sekolah di SMP Terbuka hendaknya juga lebih ringan dibanding SMP-SMP reguler. Suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan fungsi SD PAMONG dan SMP Terbuka adalah dengan meningkatkan efektivitas setiap komponen yang ada, yaitu meliputi kurikulum, fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan mekanisme operasionalnya.

Jenis pendidikan dasar hendaknya tidak hanya pendidikan dasar formal yang bersifat umum (seperti SD dan SMP), tetapi disesuaikan dengan bakat dan prospek lapangan kerja yang mungkin kelak bisa diperolehnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari meningkatnya jumlah pengangguran terutama karena naiknya jumlah tamatan pendidikan dasar dan adanya 'mismatch' dengan dunia kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Bank Dunia (John Simmons, 1980:46), yaitu untuk mengurangi adanya 'mismatch' dan meningkatnya jumlah pengangguran maka negara-negara berkembang hendaknya lebih memperluas pelaksanaan jalur pendidikan atau latihan spesialisasi untuk semua aspek pembangunan, atau usaha-usaha mandiri, terutama di pedesaan. Oleh karena itu, pendidikan dasar bagi masyarakat tidak mampu hendaknya mengacu pada spesialisasi atau kejuruan, seperti pertukangan, kerajinan, pertanian, wiraswasta, dan lainlainnya, meskipun tanpa meniadakan SMP umum (nonkejuruan). Hal ini akan menyebabkan munculnya kebutuhan dan motivasi belajar karena anak meyakini adanya relevansi keterampilan yang diperoleh dengan keuntungan ekonomisnya sehingga dapat mengatasi kesulitan hidup sehari-hari. Di samping itu, perlu diupayakan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya atau swasta yang terkait dengan program spesialisasi atau kejuruan. Misalnya, kemungkinan kerja praktik atau magang pada bengkel-bengkel otomotif, perkebunan, usaha-usaha peternakan, perkayuan, dan sebagainya.

Keberhasilan wajib belajar adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Mengingat kesadaran masyarakat tidak mampu di pedesaan masih relatif rendah terhadap pendidikan, maka pemerintah perlu meningkatkan usaha-usaha penerangan atau penyuluhan tentang program wajib belajar. Demikian pula tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat pemerintah desa perlu memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya pada warga masyarakat tentang penting dan perlunya program wajib belajar.

Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar dengan segala konsekuensi yang dikemukakan di muka sangat terbatas. Untuk itu hendaknya perlu melibatkan pihak swasta, khususnya dalam melaksanakan wajib belajar bagi masyarakat tidak mampu. Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan saat ini sudah cukup menggembirakan. Data Balitbang Depdikbud tahun 1990/91 (Kompas, 30 Juli 1992) menyebutkan bahwa jumlah SD se Indonesia 147.066 terdiri dari 136.939 negeri dan 10.127 swasta. Sedangkan jumlah SLTP sebanyak 20.605 yang terdiri dari 7.539 negeri dan 13.066 swasta. Meskipun demikian, keterlibatan swasta untuk membantu masyarakat miskin belum begitu kelihatan. Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan saat ini terutama untuk SLTP sampai dengan perguruan tinggi cenderung mengarah pada keuntungan ekonomis. Hal ini bisa dilihat dari tingginya biaya SPP dan biaya-biaya lainnya yang relatif lebih besar dari biaya sekolah negeri, dan ini jelas-jelas tidak akan terjangkau oleh masyarakat miskin. Bahkan saay ini ada indikasi terjadinya diskriminasi antara golongan 'elite' dengan 'nonelite' untuk tingkat-tingkat sekolah swasta tertentu. Oleh karena itu, perlu upaya semua pihak, terutama pihak swasta sendiri untuk lebih memberikan kontribusi terhadap masyarakat miskin dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ini.

Kesimpulan

Program wajib belajar 9 tahun merupakan program pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan yang sangat esensial dalam membentuk masyarakat yang mempunyai potensi memadai untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata.

Mengingat masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan kaitannya dengan pendidikan begitu kompleks, seperti kemiskinan, kesadaran terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi sosial ekonomi lainnya, maka pelaksanaan wajib belajar bagi masyarakat tidak mampu di pedesaan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga program wajib belajar dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, sistem pendidikan (wajib 9 tahun) yang hendak diterapkan hendaknya sejalan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat karena pendidikan bagi masyarakat desa harus menyajikan model yang hidup, berfaedah, diperlukan dan cocok dengan situasi kebudayaan pedesaan setempat, baik lokal maupun regional.

Daftar Pustaka

- Anita Woolfolk. 1984. *Educational Psychology For Teachers*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Ary Gunawan. 1986. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aswandi Bahar. 1989. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, PPLPTK.
- Bower H Gordon. 1981. *Theory of Learning*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Dachnel Kamars. 1989. *Sistem Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi: Suatu Studi Perbandingan antara Beberapa Negara*. Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, PPLPTK.
- John Simmons. 1980. *The Education Dilemma (Policy Issues for Developing Countries in The 1980s)*. Great Britain: Pergamon Press.
- Saidihardjo. 1988. "Sentuhan Pendidikan bagi Anak Kurang Beruntung di Indonesia". *Cakrawala Pendidikan*. No.3 Th VII. Yogyakarta: PPM IKIP Yogyakarta.
- Suryati Sidharto. 1989. "Problem Pelaksanaan Pendidikan Dasar (Basic Education) Sebagai Penunjang Pembangunan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif".

Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Th.VIII. Yogyakarta: PPM IKIP Yogyakarta.

- _____. *Harian Pelita* (5 Juli 1991).
- _____. *Harian Suara Pembaruan* (5 Juni 1992).
- _____. *Harian Kompas* (30 Juli 1992).